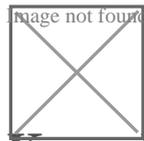


LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

Belakang RS Grhasia, Jl. Kaliurang No.KM.17, Area Sawah, Pakembinangun, Kec. Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895433

<https://lpnarkotikajogja.kemenkumham.go.id/>



Konsultasi Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

No. SK :

KEMENTERIAN HUKUM D.I.YOGYAKARTA / LEMBAGA PEMASYARAKATAN

NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

Persyaratan

1. Adanya permohonan pemberian bantuan hukum non litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala Rumah Tahanan baik secara tertulis maupun secara lisan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

Belakang RS Grhasia, Jl. Kaliurang No.KM.17, Area Sawah, Pakembinangun, Kec. Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895433

<https://lpnarkotikajogja.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / LEMBAGA PEMASYARAKATAN

NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

1. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas hukum) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (tahanan);
2. Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala Rumah Tahanan Negara secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen Lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
3. Kepala Rumah Tahanan Negara meneruskan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi Yang Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum non litigasi;
5. Apabila permohonan bantuan hukum non litigasi telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atas permohonan pemberian bantuan non litigasi oleh tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;
6. Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum non litigasi berupa penyuluhan hukum kepada tahanan;
7. Kepala Rumah Tahanan Negara mengumpulkan 30(tiga puluh) orang tahanan di ruang penyuluhan hukum untuk diberikan penyuluhan hukum oleh pemberi bantuan hukum;
8. Pemberi Bantuan Hukum memberikan konsultasi hukum kepada tahanan selama 2 jam;
9. Konsultasi hukum oleh Pemberian Bantuan Hukum dicatat dalam buku khusus kunjungan Bantuan Hukum.
10. Kepala Rumah Tahanan Negara melaporkan kegiatan penyuluhan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
11. Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;
12. Kepala Rumah Tahanan Negara menyampaikan penolakan pemberian bantuan hukum non litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Tahanan yang mengajukan permohonan;
13. Kepala Rumah Tahanan Negara melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

Belakang RS Grhasia, Jl. Kaliurang No.KM.17, Area Sawah, Pakembinangun, Kec. Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895433

<https://lpnarkotikajogja.kemenkumham.go.id/>



Waktu Penyelesaian

5 Hari

Waktu yang dibutuhkan 5 hari kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM D.I.YOGYAKARTA / LEMBAGA PEMASYARAKATAN

NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Hukum

Pengaduan Layanan

<https://jogja.kemenkumham.go.id/layanan-publik/informasi-aspirasi-pengaduan/kanal-pengaduan>